

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Definisi Implementasi

Menurut Grindle dalam Budi Winarno (2014:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang mempermudah suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2014:148) berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Jadi, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mempermudah suatu kegiatan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan program-program dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.1.2 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Secara luas implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Mazmanian & Sabatier (1983:61) dalam Leo Agustino (2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya”.

Menurut Udoji (1981:23) dalam Leo Agustino (2020:147) berpendapat implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

2.1.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisansi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atas kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin bersifat fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan.
5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
6. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
7. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena, pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen, akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya adalah:

1. Isi kebijakan

Kegagalan implementasi kebijakan publik disebabkan samarnya isi dari kebijakan, yaitu:

- a. Tujuan yang tidak cukup terperinci
- b. Sarana-sarana dan penempatan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- c. Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada

2. Kurangnya informasi

Kekurangan informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan obyek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka patuhi.

3. Kurang dukungan

Dukungan yang kurang sebelumnya atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum.

4. Adanya pembagian potensi

Pembagian potensi diantara faktor-faktor yang terlihat dalam pelaksanaan, struktur dari organisasi pelaksana (pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai oleh pembatasan-pembatasan yang kurang jelas).

2.1.5 Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van metter & van horn disebut istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia pelakasana dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu : (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, (5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variabel pertama, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, menurut lebih lanjut kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelakasa kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Variabel kedua, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang

telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Variabel ketiga, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van horn adalah Karakteristik Agen Pelaksa, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi pelaksanaannya.

Variabel keempat, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Sikap atau Kencenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Variabel kelima, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Variabel keenam, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn adalah Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Definisi Kebijakan

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Walaupun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas Dye (1992:2-4) dalam Sahya Anggara (2014 : 35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan”.

Adapun menurut Anderson dalam Budi Winarno (2014:21: berpendapat bahwa:

“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas tentang kebijakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ialah suatu sikap kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah dan suatu persoalan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2.2.2 Sifat-sifat kebijakan

Sifat-sifat kebijakan terdiri dari (i) permintaan kebijakan atau *policy demands*, (ii) keputusan kebijakan atau *policy decisions*, (iii) pernyataan kebijakan atau *policy statements*, (iv) hasil kebijakan atau *policy outputs*, dan (v) dampak kebijakan atau *policy outcomes*. Anderson (1990:4-5) dalam Leo Agustino (2020:23) dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, permintaan kebijakan atau *policy demands* merupakan permintaan, tuntutan, atau kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat secara pribadi atau kelompok (*public problems*) kepada pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan kebijakan dapat berupa tekanan dan tuntutan kepada pemerintah, dimana pemerintah diharapkan melakukan sesuatu dalam bentuk usulan kebijakan (agar menjadi *agenda setting*) dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks *policy demands*, tuntutan, tekanan atau desakan publik kepada pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah merupakan hal utama dalam permintaan kebijakan untuk dipertimbangkan dalam mempelajari proses formulasi kebijakan publik.

Kedua, keputusan kebijakan atau *policy decisions* adalah keputusan terbaik yang dipilih dan diambil oleh aktor-aktor kebijakan dari beberapa alternatif kebijakan yang telah dikaji secara mendalam untuk menyelesaikan suatu masalah. Keputusan kebijakan menjadi bagian terberat dalam proses formulasi kebijakan karena sebelum keputusan akhir diambil dan ditetapkan kerap terjadi tarik-menarik kepentingan didalamnya.

Ketiga, *policy statements* atau pernyataan kebijakan adalah artikulasi formal dari keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dekrit presiden, keputusan lembaga peradilan, ketetapan kepala daerah dan lain sebagainya.

Keempat, *policy output* adalah hasil akhir dari proses formulasi kebijakan dimana pemerintah diarahkan untuk mengarahkan seluruh sumber dayanya untuk mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan seperti termasuk dalam kebijakan.

Kelima, *policy outcomes* adalah dampak yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun tidak semua *policy output* kongruen dengan *policy outcomes*.

2.2.3 Pendekatan kebijakan publik

Merujuk pada beberapa *scholars* setidaknya beberapa pendekatan dalam kebijakan publik diantaranya adalah: (i) teori sistem (*systems theory*), (ii) teori kelompok (*group theory*), (iii) teori elit (*elite theory*),

(iv) teori fungsional (*functional process theory*), dan (v) teori kelembagaan (*institutionalism*). Dalam penjelasan berikut ini:

1. Teori sistem

Kebijakan publik dalam sistem politik, dapat dipandang sebagai reaksi pemerintah atas tuntutan, kebutuhan, serta dukungan yang timbulkan oleh lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud disini, bukan hanya masyarakat semata, tetapi juga lingkungan global.

2. Teori kelompok

Teori kelompok dalam kebijakan mempunyai anggapan bahwa interaksi dan perjuangan diantara kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Kelompok pada dasarnya adalah sekumpulan individu yang bergerak atas dasar kepentingan yang sangat mungkin berbeda kepentingan dengan kelompok lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kelompok berusaha berusaha untuk memenuhi kepentingannya dengan cara berjuang 'melawan' kelompok lainnya agar pemerintah memformulasikan kebijakan yang berorientasikan pada kepentingan mereka.

3. Teori elit

Dari sudut pandang teori elit, kebijakan adalah nilai dan pilihan yang dipilihkan oleh elit pemerintah. Penjelasan utama teori elit adalah bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh 'massa' melalui tuntutan dan kebutuhan mereka, tetapi ditentukan oleh elit yang mengatur institusi politik.

4. Teori proses fungsional

Cara lain untuk memahami analisis kebijakan adalah memahami bermacam-macam aktivitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan itu sendiri.

5. Teori kelembagaan

Teori kelembagaan melihat bahwa ilmuwan politik dan kebijakan telah mengalihkan perhatian mereka dalam pengajar dan meneliti dari proses politik di lembaga-lembaga politik menuju perilaku para *decision makers* dalam proses kebijakan.

2.3 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satu pun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya berjumpa di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, maupun Hongaria. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban.

Menurut Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2001) dalam Edi Suharto (2009:15) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan :

1. Kekurangan materi

Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.

2. Rendahnya penghasilan

Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.

3. Adanya kebutuhan sosial

Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkecualian sosial (*social exclusion*), ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Menurut Smeru dalam Edi Suharto (2009:16) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;

3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)';
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur. Lokasi terpencil. Ketiadaan infrastruktur jalan, listrik dan air);
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun masal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

2.4 Program Kartu Keluarga Sejahtera

2.4.1 Definisi Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.

Sumber: (PERMENSOS NOMOR 20 TAHUN 2019 Pasal (1) Ayat (6).
Tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai).

2.4.2 Definisi Program Kartu Keluarga Sejahtera

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin. KKS menjadi media bersama dalam penyaluran berbagai Bansos seperti Bansos Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, diintegrasikan penyalurannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sumber: (Jurnal, 2018 <http://ejournal.pps-unisti.ac.id>).

2.5 Tujuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan kesulitan ekonomi.

3. Untuk mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Membangun Keluarga Produktif dengan memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera.
5. Serta dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu.

2.6 Manfaat Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Perbaikan pendidikan generasi mendatang
 - a. Anak usia sekolah harus bersekolah
2. Perbaikan kualitas kesehatan
 - a. Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
 - b. Pemeriksaan kesehatan bagi anggota rumah tangga
 - c. Penerapan pola hidup sehat untuk usia lanjut
3. Perubahan perilaku pengelolaan keuangan, melalui pembukaan rekening tabungan.

2.7 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia

Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif.

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 20 TAHUN 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

2.8 Syarat Mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera

1. Surat keterangan dari RT/RW setempat.
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu tanda Penduduk (KTP).